

## **BAB IV**

### **KEPENTINGAN POLITIK ARAB SAUDI MENDUKUNG KELOMPOK OPOSISI SURIAH**

Pada bab sebelumnya, telah dijelaskan mengenai keterlibatan Arab Saudi dalam konflik Suriah, dimana Arab Saudi memberikan dukungan berupa bantuan militer, finansial dan kemanusiaan terhadap kelompok oposisi Suriah, disamping itu Arab Saudi secara global berupaya mengajak negara-negara yang tergabung dalam komunitas internasional seperti Liga Arab dan PBB untuk membantu gerakan oposisi untuk melengserkan pemerintah Bashar A-Assad. Bahkan pada kesempatan lain, Arab Saudi dan Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki latar belakang yang berbeda, melakukan hubungan kerjasama dalam penyelesaian konflik di Suriah dalam rangka memenuhi kepentingan nasional masing-masing negara.

Pada bab ini akan menjelaskan tentang kepentingan politik Arab Saudi mendukung kelompok oposisi Suriah dalam upaya melengserkan pemerintah Bashar Al-Assad. Ada beberapa hal penting yang akan dibahas. Pertama, Permusuhan Arab Saudi dan Iran. Kedua, Perang Proksi Arab Saudi dan Iran di Suriah. Ketiga, Koalisi Iran-Suriah sebagai ancaman bagi Arab Saudi yang didalamnya berisi poin tentang Hubungan dekat Suriah dan Iran serta melengserkan Bashar Al-Assad sebagai upaya mempertahankan eksistensi Arab Saudi di Timur Tengah

#### **A. Permusuhan Arab Saudi dan Iran**

Dalam keputusannya mendukung kelompok oposisi, Arab Saudi memiliki kekhawatiran atas dukungan yang Iran berikan kepada Bashar Al-Assad. Pada awalnya, hubungan Arab Saudi dan Iran bukanlah sekutu maupun musuh, namun sebagai rival yang bersaing sejak lama. Kedua negara merupakan penghasil minyak terbesar di Timur Tengah dan masing-masing negara memiliki latar belakang agama yang sama namun dengan

aliran yang berbeda, yaitu Sunni dan Syiah. Kedua negara mulai menunjukkan bibit permusuhan sejak pecahnya revolusi Iran. Pada tahun 1979, terjadi revolusi di Iran yang di prakarsai oleh Sayyid Aytollah Tuhollah Khomeini (Welle, Deutche, 2009). Revolusi ini berhasil menggulingkan pemerintah monarki Iran yang dianggap kejam dan menggantinya dengan "Republik Islam Iran".

Pada saat itu Arab Saudi sebagai negara Islam, mengakui pemerintahan baru Iran pada saat itu dan Raja Arab Saudi, Khalid bin 'Abd al 'Aziz Al Su'ud mengirim surat kepada Presiden Ayaatollah Khomeini yang berisikan ucapan selamat atas keberhasilan akan republik baru dan menyatakan kesediaan Arab Saudi untuk melanjutkan hubungan baik mereka dan membangun kerjasama yang menekankan pada "solidaritas Islam" sebagai dasar dari kedekatan hubungan antara Arab Saudi dan Iran.

Namun, Setelah revolusi Islam, Iran mulai menyatakan dukungan terhadap isu-isu Syiah di kawasan Timur Tengah dengan mengirimkan dukungan pada kepentingan Syiah di negara-negara Timur Tengah. Pada tahun 1980-1988, terjadi konflik Iran-Irak. Arab Saudi sejak dini telah menyatakan dukungannya terhadap presiden Irak Saddam Hussein dalam peperangan tersebut. Riyadh bahkan memberikan dana sumbangan sebesar 25 milyar US Dollar dan mendesak negara-negara teluk lain menyumbangkan dana perang kepada Irak. Untuk menutupi biaya tersebut, Arab Saudi meningkatkan produksi minyak mentah, yang kemudian mengakibatkan runtuhnya harga minyak dunia (Welle, 2016). Saddam mendapatkan dukungan dari beberapa pihak yaitu, Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 598 yang menekan Iran, presiden AS Ronald Reagan melalui Donald Rumsfeld, dan Liga Arab melalui hasil KTT di Amman 1980 dan 1987. Perang berakhir ketika Iran bersedia menerima resolusi gencatan senjata DK PBB dengan alasan kemanusiaan (Aburish, 2000). Setelah peperangan ini terjadi. Pada tahun 1981, negara-negara kawasan yang khawatir akan kebangkitan

Iran, membentuk *Gulf Cooperation Council* (GCC) atau disebut Dewan Kerjasama Teluk dibentuk oleh Arab Saudi sebagai ketua, bersama dengan Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, Bahrain, Qatar dan Oman. Aliansi tersebut dibentuk untuk memperkuat hubungan di antara negara-negara anggotanya dan untuk mempromosikan kerja sama antar negara-negara tersebut (Das, 2010).

Hubungan diplomatik kedua negara kembali memburuk pada tahun 1987. Sekitar 275 warga negara Iran tewas dalam bentrokan yang terjadi di Makkah dari total korban 402 Jamaah (BBC, 2015). Bentrokan tersebut merupakan hasil dari demonstrasi Jamaah Iran yang menentang hubungan Arab Saudi dengan Amerika Serikat dan Israel. Atas kejadian ini, Kedubes Arab Saudi di Teheran dibakar dan mengakibatkan meninggalnya seorang diplomat Arab Saudi. Atas kejadian ini, Raja Fahd memutuskan hubungan diplomatic dengan Iran pada bulan April 1988 (Novianti, 2016).

Arab Saudi kembali merasa waspada sejak Iran memberlakukan program energi nuklir dibawah pemerintahan Mahmud Ahmadinejad. Pada tahun 2007, Arab Saudi mengungkapkan bahwa Iran menempatkan posisi negara-negara kawasan dalam bahaya terkait program nuklir Iran karena akan memancing konflik dengan Amerika Serikat. Disisi lainnya Arab Saudi memilih untuk bersikap netral terhadap nuklir Iran karena Arab Saudi secara rasional memikirkan jarak geografis yang sangat dekat dengan Iran. Arab Saudi khawatir apabila Iran benar-benar mengembangkan senjata nuklir seperti yang dituduhkan oleh aliansinya Amerika Serikat yang sudah terlebih dahulu mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengehentikan program nuklir Iran (Setya, 2012). Arab Saudi memperhitungkan dampak keamanan nasioanal yang ditimbulkan oleh nuklir Iran pada saat itu.

Tragedi di Makkah kembali terjadi pada tahun 2015 ketika lebih dari 2.017 jiwa meninggal dunia, dan 465 jiwa berasal

dari Iran (SindoNews, 2015). Pemimpin tertinggi Syiah Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan pemerintah Arab Saudi harus memikul tanggung jawab sepenuhnya atas bencana ini. Sedangkan pemerintah Arab Saudi mengatakan bahwa teragedi tersebut disebabkan Jemaah haji Iran yang tidak mau diatur dengan merubah rute dan melawan arus (BBC, 2015).

Ketegangan kedua negara terus berlanjut terlebih saat eksekusi hukuman mati Nimr Al-Nimr, seorang ulama Syiah yang aktif membela hak minoritas Syiah di Arab Saud pada tahun 2016. Menanggapi hal tersebutsekitar 2.000 orang mendatangi Kedubes Arab Saudi di Teheran dan melempar bom Molotov ke kantor kedutaan tersebut. Akibat kejadian tersebut, Arab Saudi menarik semua diplomatnya di Iran dan melakukan pengusiran terhadap semua diplomat Iran dalam tempo 48 jam setelah kejadian tersebut (Prasetyo, 2016). Keputusan pemutusan diplomatik ini sudah kali kedua dilakukan pemerintah Arab Saudi terhadap Iran setelah tahun 1988.

Hubungan bilateral antara Arab Saudi dan Iran selalu mengalami pasang surut konflik dalam berbagai bidang. Arab Saudi berasumsi bagwa Iran merupakan ancaman bagi keamanan negara-negara Timur Tengah. Sementara, Iran menganggap Arab Saudi tidak mewakili Islam, melainkan kepentingan barat. Hubungan kedua negara telah mengalami perubahan yang sangat besar setelah adanya temuan dokumen yang dibocorkan oleh *Wikileaks* pada tahun 2010 yang menyebutkan bahwa Raja Abdullah mendesak Amerika Serikat untuk menyerang Teheran (Fanani, 2016). Meskipun dokumen tersebut dibantah oleh pihak Arab Saudi, namun hubungan Raja Abdullah dengan Ahmadinejad tidak menunjukkan perubahan.

Setelah adanya perubahan besar hubungan kedua negara setelah bocornya dokumen tersebut, konflik di Suriah pada tahun 2011 merupakan konflik kesekian antara keduanya bertemu untuk memperebutkan kekuasaan. Dukungan

pemerintah Iran terhadap rezim Bashar Al-Assad menarik perhatian Arab Saudi sebagai negara yang telah memiliki sejarah panjang permusuhan terhadap Iran. Konflik Suriah telah menjadi babak baru permusuhan kedua negara dalam memperebutkan kekuasaan dan pengaruh di kawasan Timur Tengah.

### **B. Perang Proksi antara Arab Saudi dan Iran di Suriah**

*Proxy War* (Perang Proksi) merupakan perang antara dua pihak yang tidak saling berhadapan-hadapan namun menggunakan pihak ketiga untuk mengalahkan musuh. Perang proxy tidak dapat dikenali secara jelas siapa kawan dan siapa lawan karena musuh menggunakan dan mengendalikan *actor non state*. Indikasi adanya Perang Proksi diantaranya gerakan separatis, demonstrasi massa dan bentrok antar kelompok. Dalam kasus Suriah, indikasi tersebut ditemukan dengan adanya upaya yang berlawanan antara Arab Saudi dan Iran dalam usaha penyelesaian konflik tersebut.

Arab Saudi dan Iran sedang berjuang untuk mendominasi pengaruh dan kekuasaan di Timur Tengah. Alih-alih menciptakan perdamaian di Timur Tengah, kedua negara dinilai semakin memperburuk situasi dengan memanfaatkan isu kediktatoran, kekerasan militer dan ekstrimis religius (Times, 2016). Terjadinya konflik tersebut tidak terlepas bahwa adanya perpecahan keyakinan antara kedua negara tersebut yaitu Sunni dan Syiah. Dalam kasus Suriah, Bashar Al-Assad merupakan penganut Syiah merupakan sekutu yang wajib untuk dibela Iran. Arab Saudi dalam perang proksi yang terjadi berusaha mencegah hal tersebut.

Ketika terjadinya fenomena Arab Spring, Arab Saudi merasa khawatir akan berkembangnya kekuatan Iran, terlebih dengan adanya fakta bahwa Iran selalu hadir dalam setiap konflik di Timur Tengah, sehingga Arab Saudi dengan cepat mengambil langkah, terkadang dengan cara militer untuk mencegah hal tersebut. Hal ini dibuktikan dengan konflik-

konflik seperti yang terjadi di Irak, Yaman, Lebanon dan dalam kasus ini Suriah, ketika Arab Saudi memberikan bantuan militer kepada pihak yang melawan Iran dan ideologi Syiah (Dhawan, 2017). Meskipun paham Iran memiliki pengaruh yang tidak besar dalam upayanya di negara-negara Timur Tengah, dalam hal ini fakta bahwa hingga saat ini ideology Syiah di negara-negara Timur Tengah masih menjadi minoritas, namun ketakutan Arab Saudi untuk kehilangan kekuasaannya membuat negara tersebut berjuang lebih keras untuk mempertahankan pengaruhnya.

Sejak berlangsungnya konflik Suriah lima tahun terakhir, Iran telah memberikan dukungan beruma finansial, latihan bersama dan memberikan alat pengintai kepada pemerintah Suriah. Kemudian Iran mengirimkan tentara *Quds Force* dan *Iran dari Islamic Revolutionary Guard Corps* (IRGC) untuk membantu tentara pemerintah Suriah, serta bantuan dari kelompok Syiah, Hizbullah yang berjuang di sisi Bashar Al-Assad (Amalia, 2016). Teheran diyakini menghabiskan miliaran dolar setahun untuk mendukung Assad, memberikan penasihat militer dan senjata bersubsidi, serta jalur transfer kredit dan minyak. Arab Saudi di sisi lain telah mendukung gerakan oposisi Suriah dengan memberikan dukungan militer maupun finansial terhadap FSA, sejak tahun 2013 Arab Saudi secara resmi menjadi salah satu negara penyedia utama persenjataan bagi kelompok oposisi Suriah. Dalam forum internasional, Arab Saudi beberapa kali telah mendesak negara-negara untuk melakukan resolusi militer dalam konflik Suriah.

Pada tahun 2016, Pasca keputusan pemerintah Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran, setelah kedutaan dan konsulatnya diserang demonstran yang marah atas eksekusi mati ulama Syiah Nimr Baqr al-Nimr, konflik di Suriah kian memanas, menanggapi hal tersebut, beberapa pihak telah mendesak percepatan upaya perdamaian kedua negara tersebut di Suriah. Mediator Suriah di PBB, Staffan de Mistura mengunjungi Riyadh dan Teheran pada Januari 2016

untuk membicarakan upaya gencatan senjata di Suriah. Stephane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon mengatakan "Sekretaris Jenderal mendesak kedua menteri luar negeri untuk menghindari tindakan lebih lanjut bisa memperburuk situasi antara kedua negara dan di kawasan secara keseluruhan" (CNN, 2016).

Menurut para ahli, perang proksi antara Arab Saudi dan Iran di Suriah sendiri memiliki kemungkinan kecil untuk terjadinya konfrontasi militer secara langsung, namun krisis Saudi-Iran setidaknya lebih berpengaruh pada situasi di wilayah konflik seperti Suriah di mana kedua negara berada di kubu berlawanan akan menyebabkan konflik semakin panas dan meningkat (Detik, 2016). Krisis ini menyebabkan upaya internasional dalam mencari solusi damai bagi konflik Suriah terganggu.

### **C. Koalisi Suriah dan Iran Sebagai Ancaman Bagi Arab Saudi**

Pada konflik yang terjadi di Suriah, ada dua koalisi yang berlawanan dalam upaya penyelesaiannya, yaitu koalisi Iran-Suriah dan Arab Saudi-Amerika Serikat. Adanya koalisi tersebut bukan tanpa sebab, melainkan karena hubungan yang sudah terjalin sejak lama sehingga menyebabkan perlunya kerjasama untuk mendukung pihak masing-masing. Dalam kubu Suriah, Iran hadir sebagai negara yang memiliki latar belakang Syiah sebagai kepercayaan nasionalnya mendukung pemerintah Bashar Al-Assad yang memiliki kepercayaan yang sama di pemerintahannya. Sementara itu, menteri Iran menekankan bahwa negara dan bangsanya berdiri disisi Suriah secara konsisten dan didasarkan pada keyakinan mutlak bahwa rakyat Suriah sedang memasuki perang dunia sengit melawan kelompok terorisme yang kolot dan paham radikal kelompok oposisi.

#### **1. Hubungan Dekat Suriah dan Iran**

Koalisi yang terjadi antara Iran dan Suriah sudah terbentuk sejak perang Irak-Iran pada tahun 1980-1988, Suriah pada

masa pemerintahan Hafez Al-Assad mengambil keputusan untuk mendukung Iran. Pada tahun 1982, kedua negara menyepakati kerjasama. Iran memasok minyak kepada Suriah dan sebaliknya Suriah memutus pipa minyak Irak yang melintasi wilayah Suriah. (Baiadawi, 2014) Hubungan kedua negara terus berlanjut hingga era modern pemerintahan Suriah. Bashar Al-Assad merupakan kepala negara pertama yang menyatakan ucapan selamat atas terpilihnya Ahmad Dinejad sebagai presiden pertama Iran pada tahun 2005. (Karbesi, 2016)

Pada tanggal 16 Juni 2006, menteri pertahanan Iran dan Suriah menandatangani sebuah kesepakatan untuk kerja sama militer melawan kepentingan Amerika Serikat-Israel yang menyebut mereka sebagai *common thread*. Dalam wawancaranya kepada media Lebanon, *Daily Star*, Menteri pertahanan Iran, Mostafa Mohammad-Najjar mengatakan, "Iran menganggap keamanan Suriah sebagai keamanannya sendiri dan mempertimbangkan memberikan kemampuan pertahanan kami untuk menjadi milik Suriah". Kesepakatan tersebut menghasilkan bantuan besar-besaran militer Iran terhadap pemerintah Suriah (DailyStar, 2006). Disamping itu, Iran secara konsisten menginvestasikan miliaran dollar pada perekonomian Suriah.

Pada tahun 2007, Bashar Al-Assad melakukan kunjungan selama dua hari ke Teheran, Iran. Kunjungan ini tidak lain adalah untuk meningkatkan hubungan dengan negara pemrakarsa Syiah tersebut. Kunjungan tersebut bertujuan untuk meluruskan hubungan kedua negara dalam kepentingan regional, khususnya permasalahan Irak, Lebanon, Palestina dan Afghanistan. Kedua negara sepakat melawan kekuatan Amerika Serikat yang berkoalisi dengan Arab Saudi yang memberikan tekanan terhadap Suriah dan Iran di dalam kawasan (Haaretz, 2007).

Pada tahun 2008, aliansi yang dibangun antara Suriah-Iran-Hizbullah yang disebut "Aliansi 8 Maret" berhasil

membawa Lebanon berada dibawah kekuasaan Syiah, setelah sebelumnya pemerintah yang pro terhadap Barat tersebut digulingkan (CNN, 2014). Sekretaris Jenderal gerakan perlawanan Libanon, Hizbullah, Sayyid Hassan Nasrallah, mengatakan bahwa "Ketika Lebanon selatan diduduki oleh Israel, tidak ada negara di dunia ini kecuali Iran dan Suriah yang membantu negara tersebut untuk mengakhiri pendudukan Israel" (Arrahmah, 2017). Pada dasarnya Lebanon merupakan negara yang diperebutkan oleh kedua aliansi antara Iran-Suriah dengan Israel-Amerika Serikat-Arab Saudi. Iran dan Suriah sepakat mengakhiri 15 tahun pendudukan militer Israel di negara tersebut. Dengan adanya dukungan tersebut, membuat Suriah tidak dapat mempertahankan hubungan dengan negara-negara kawasan lainnya terutama Arab Saudi. Suriah menjadi semakin bergantung terhadap perlindungan Iran dalam dukungan politik dan militer yang merupakan negara pesaing Arab Saudi dalam kawasan.

Pada bulan Juni 2011, komandan *Quds Force* atau Pasukan Quds Iran, Qasse Suleimani dan Wakil Presiden Untuk Keamanan Suriah, Nasif Kheirbek melakukan pertemuan yang menghasilkan keputusan pengiriman penasihat militer *Iran dari Islamic Revolutionary Guard Corps* (IRGC) dan Quds Force untuk melatih personil dan memberikan bantuan untuk memperkuat pasukan pemerintah Bashar Al-Assad melawan para demonstran. Pada tahun yang sama Iran memberikan bantuan persenjataan berupa senjata otomatis, peluncur roket, serta mortar. Sebesar 23 Juta Dollar US diberikan Iran kepada pemerintah Suriah untuk membangun pangkalan militer di Latakia, untuk memfasilitasi pengiriman senjata dari Iran ke Suriah. Dilaporkan sebanyak 4.000 anggota IRGC dikirimkan ke Suriah untuk bertugas melawan kelompok oposisi.

Pada tahun 2012, PBB melakukan resolusi perdamaian di Suriah dan mengirimkan pengamatnya untuk memantau pelaksanaan tersebut, namun Iran berhasil mengirimkan persenjataan melalui perbatasan Al-Walid at-Tanf. Temuan ini

dilaporkan oleh tim pemantau PBB yang sedang menjalankan tugas di Suriah. Pengiriman tersebut berupa roket dan senjata. Dalam laporan itu juga menyebut usaha Iran menghindarkan sanksi dengan mengubah nama-nama kapal untuk mengaburkan identitasnya dan menggunakan perusahaan-perusahaan perantara untuk menyuplai secara ilegal persenjataan (VOA, 2012). Meskipun begitu, pemerintah Teheran, Iran bersitegas menyangkal tuduhan tersebut meskipun bukti sudah menunjukkan pengiriman senjata untuk membantu kelompok IRGC dan Quds Force yang sedang bertugas di negara tersebut.

Kemudian, pada pelantikan Presiden Iran, Hassan Rouhani pada tanggal 3 Agustus 2013, beliau mengatakan dengan tegas bahwa aliansi Iran dengan Suriah akan terus berlanjut. Pada tahun ini Iran menyetujui hasil dari perundingan dengan negara-negara PBB untuk membatasi percobaan nuklirnya (BBC, 2013). Sejak tahun 2006, Suriah merupakan negara satu-satunya yang mendukung kepemilikan nuklir oleh Iran dalam rangka mengantisipasi tekanan yang diberikan oleh aliansi Israel-Amerika Serikat.

Bulan Agustus 2015, kedua negara kembali menegaskan kembali kedekatan hubungannya. Menteri Informasi Suriah, Omran Zoabi dalam laporan *World Bulletin* mengatakan, "Jenis hubungan Iran-Suriah jauh berada di luar hubungan antara dua anggota masyarakat internasional, yaitu merupakan hubungan antara dua bersaudara dan tidak ada yang bisa memisahkan mereka" (MuslimDaily, 2015). Otoritas Amerika Serikat mengatakan sekitar 2.000 pejuang dari Iran dan sekutunya mendukung pasukan Suriah untuk memerangi pemberontak, dan mereka berkoordinasi dengan Rusia (CNN, 2016).

Pada 28 Oktober 2016, Diplomat Rusia, Suriah dan Iran bertemu di Moskow dan bersumpah membangkitkan pembicaraan mengenai Suriah guna memfasilitasi solusi politik untuk krisis berlarut-larut di negara Timur Tengah yang

dilanda perang (HarianSuara, 2016). Hubungan kerjasama ini diresmikan pada pertemuan ketiga negara di ibu kota Kazakstan, Astana, dan diberi nama "Deklarasi Moskow". Iran yang merupakan aliansi Suriah, berhasil menyepakati kerjasama dengan negara adidaya Rusia yang merupakan musuh tradisional Amerika Serikat dalam bidang politik dan militer dan merupakan negara yang memiliki ajaran komunisme yang merupakan musuh bagi Arab Saudi.

Bagi Iran sendiri, Bashar Al-Assad adalah bentuk bantuan pertahanan melawan Amerika Serikat dan Israel. Tanpa dukungan Suriah, kepentingan Iran atas Hizbullah dan Hamas sebagai gerakan Syiah akan kalah. "Suriah merupakan koalisi berharga untuk melakukan perlawanan. Iran tidak siap untuk kehilangan Suriah sebagai penyeimbang kekuatan menghadapi Israel" Pernyataan tersebut dilontarkan mantan menteri luar negeri Iran, Ali Akbar Velayati pada 27 Maret 2013 (Fulton, 2013).

Pada kasus konflik Suriah, Iran berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan bantuan terhadap pemerintah Bashar Al-Assad. Departemen resmi Amerika Serikat mengatakan secara resmi bahwa Iran telah meningkatkan dukungan terhadap Bashar Al-Assad dalam upaya untuk meyakinkan bahwa aliansi Syiah masih berada dalam kekuatan (BBC, 2015).

Banyaknya hubungan kerjasama dan dukungan dari pemerintah Iran terhadap Suriahtelah menjadi ancaman bagi Arab Saudi yang memiliki kepentingan yang bersebrangan dengan Iran di kawasan Timur Tengah, terlebih ketika koalisi Iran-Suriah berhasil menggandeng negara besar seperti Rusia untuk membantu kepentingan mereka. Hal ini merupakan ancaman eksistensi bagi Arab Saudi sebagai negara yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan dirinya sebagai *major power* di kawasan Timur Tengah.

#### **D. Melengserkan Bashar Al-Assad Sebagai Upaya Mempertahankan Eksistensi Arab Saudi di Timur Tengah**

Bashar Al-Assad merupakan presiden yang ditunjuk untuk menggantikan Hafez Al-Assad yang meninggal pada tahun 2000. Bashar Al-Assad menerapkan *Assad favoritisme pro-Alawite* yaitu menggunakan status minoritas Syiah sebagai kekuatan untuk mendukung kepentingan politiknya (Times, 2000). Bashar Al-Assad juga menyebut dirinya pelindung minoritas, sehingga mendapatkan dukungan dari pihak-pihak yang memiliki keyakinan yang sama untuk mendukung atas nama loyalitas terhadap Syiah.

Munculnya demonstrasi besar-besaran di Suriah telah menarik perhatian Iran dan Arab Saudi, hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa Suriah adalah bagian utama dalam proyeksi kekuatan Iran di Kawasan Timur Tengah (Sullivan, 2014). Iran telah menjadikan Suriah sebagai tempat untuk melatih, mendanai, mempersenjatai dan memberikan bantuan kemanusiaan dan finansial terhadap pemerintah Suriah. Dalam hal ini, Iran telah mengirimkan Quds Force dan IRGC untuk melatih kelompok militan Syiah Hizbullah. Kelompok ini bertujuan untuk menangkal segala ideology yang dibawa Amerika Serikat dan mengimangi kekuatan Sunni di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, kelompok Hizbullah telah membawa perubahan besar pada konflik di Lebanon dan berhasil menggantikan pemerintahan negara tersebut dibawah kekuasaan Hizbullah.

Kemenangan kelompok Hizbullah dalam pelengseran kekuasaan di Lebanon semakin meningkatkan upaya Iran menciptakan *Balance of Power* melawan kekuatan Arab Saudi dan aliansinya Amerika Serikat di Timur Tengah. Dalam tujuannya mengurangi kekuatan Iran, Arab Saudi memberikan dukungannya terhadap kelompok oposisi *Free Syrian Army* dan *Syrian National Council*.

Segala bentuk dukungan dan upaya antara Arab Saudi dan Iran, menyebabkan konflik Suriah menjadi ajang perebutan kekuasaan antara Arab Saudi dan Iran sebagai negara yang memiliki pengaruh besar di kawasan. Suriah dibawah pemerintahan Bashar Al-Assad dianggap membahayakan kepentingan politik Arab Saudi. Iran akan dengan mudah mengembangkan kerjasama ekonomi, minyak dan gas. Iran juga akan lebih mudah memberikan dukungan kekuatan terhadap Hizbullah di kawasan yang akan menyebabkan menyebarnya revolusi Islam dibawah kekuasaan Iran. Bisa dipastikan konstalasi politik internasional di Timur Tengah akan mengganggu dominasi Arab Saudi dan aliansinya Amerika Serikat

Melalui gelombang demokrasi yang terjadi pada tahun 2011, merupakan kesempatan bagi Arab Saudi untuk menyiasati pergantian kepemimpinan dengan cara melengserkan Bashar Al-Assad melalui dukungannya terhadap kelompok oposisi. akan membuat Suriah berada dibawah kekuasaan Arab Saudi, serta mengurangi akses bantuan terhadap kelompok Syiah Hizbullah dan mengurangi negara aliansi Iran dan mencegah kekuatan Iran terus berkembang di dalam kawasan yang akan berimbang pada menguatnya eksistensi Arab Saudi di kawasan.